



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
Nomor 64/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **empat belas** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh satu** pukul **17:45** WIB, diajukan **Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Hardizal, S.Sos, M.H. , berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 07 Desember 2021 memberi kuasa kepada Harli, S.H., M.T., M.A. , dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Berkas permohonan tersebut akan diperiksa kelengkapannya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), "Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan/atau Pasal 13."

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PMK 2/2021, dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Panitera menerbitkan dan menyampaikan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP) kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Jumat** tanggal **tiga puluh satu** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh satu** pukul **15:31** WIB WIB.

**Panitera
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
AP3 Nomor 64/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (DKP3)

Pemohon : Hardizal, S.Sos, M.H.
Pokok Permohonan : Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
No APPP : 64/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/docx)	1	
3	Surat Kuasa	1	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	1	
5	Alat Bukti	1	
6	KTP An. Hardizal, S.Sos, MH, NIK 1572011604640001	1	
7	UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	1	
8	UUD 1945	1	
9	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi	1	
10	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	1	
11	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	1	
12	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang	1	
13	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005	1	
14	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007	1	
15	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019	1	
16	Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Nomor Putusan 37/PID.B/2002/PN.SPN	1	
17	Surat LEPAS Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sungai Penuh Tanggal 11 Februari 2003	1	

18	Surat tanda terima pembayaran Pidana Denda tanggal 11 Februari 2003, yang dikeluarkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungai Penuh	1	
19	Surat Rekomendasi PDI Perjuangan dengan SK Nomor: 1999/IN/DPP/VIII/2020 Tentang Persetujuan Pasangan Calon WaliKota dan Wakil Walikota	1	
20	Surat Rekomendasi Partai Persatuan Pembangunan (dengan SK Nomor: 177/SK/DPP/C/VIII/2020 Tentang Persetujuan Pasangan Calon WaliKota dan Wakil Walikota	1	
21	Surat Rekomendasi Partai Berkarya, dengan SK Nomor: SK-001/PILKADA/DPP-BERKARYA/VIII/2020 Tentang Persetujuan Pasangan Calon WaliKota dan Wakil Walikota	1	
22	Penandatanganan Berita acara Deklarasi	1	
23	Pengalihan Rekomendasi Partai Berkarya ke Pasangan Calon Fikar AZami dan Yos Ardini dengan SK Rekomendasi Nomor K-020/PILKADA/DPP-BERKARYA/VIII/2020 Tentang Persetujuan Pasangan Calon WaliKota dan Wakil Walikota,	1	
24	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) An. Hardizal, S.Sos. MH, No: SKCK/YANMAS/3079/IPP.2.3/IX/2020/INTELKAM, tanggal 2 September 2020, menerangkan bahwa nama tersebut pernah terlibat dalam kegiatan kriminal seperti tercantum pada UU No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika dan telah menjalani hukuman, mulai ditahan tanggal 24 Februari 2002 dan bebas tanggal 2 Desember 2020, berdasarkan putusan PN Sungai Penuh	1	
25	Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013	1	
26	Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional	1	
27	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan	1	
28	KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana)	1	
29	UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lembaran Negara No, 2009/NO.143, TLN. NO. 5062, LL SETNEG : 96 HLM	1	
30	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	1	
31	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	1	
32	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	1	
33	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	1	
34	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	1	
35	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	1	
36	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah	1	

37	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	1	
38	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	1	
39	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1	
40	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,	1	
41	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009	1	
42	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015	1	
43	Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2021	4 rangkap	1 Asli, 3 Copy (SKK). KTP, KTA, dan BAS para Kuasa Hukum 4 rangkap copy
44	Daftar Alat Bukti tanggal 14 Desember 2021 untuk Bukti P-1 sd P-37	4 rangkap	1 Asli, 3 Copy
45	Bukti P-1 sd P-37	4 rangkap	1 Asli, 3 Copy
46	Permohonan bertanggal 14 Desember 2021	4 rangkap	Antara hardcopy dan softcopy berbeda, mohon menyerahkan softcopy yang sama dengan hardcopy yg dikirimkan terakhir
47	Permohonan tanggal 14 Desember 2020 (renvoi 2021)	2 files (PDF dan Ms Word)	Diterima melalui email MKRI (Rabu, 22 Desember 2021 pukul 19.44 WIB). Jumlah halaman 32 lembar

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

Perhatian:

- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.